Peran Wali Hakim dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo

Naila Ni'mal Muna

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

naylanimalmuna@gmail.com

Abstract

The main problem in the research is how the role of guardian judges in marriage, at KUA Kutoarjo District Purworejo Regency. The type of research used in this is field research. The results of this study indicate that the role of guardian judges in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Kutoarjo District, Purworejo Regency, namely marrying prospective brides who do not have a guardian or guardian its whereabouts are unknown then the guardianship is transferred to the guardian judge in this case the head of the KUA , as in the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. Then, before the head of the KUA acts as the guardian of the judge, it is necessary to do research first by the KUA that shows the truth of the guardianship issue of the prospective bride. With the existence of a marriage guardian in marriage, it can play a role in protecting women from the possibility of harm in their marital household, as well as the fulfillment of the conditions and pillars of marriage in advance. The role of the judge's guardian at KUA Kutoarjo city is based on a review of fiqh and the Compilation of Islamic Law, namely attending, witnessing, recording and marrying women who are about to marry but do not have nasab guardians, and will be responsible for their role when they become guardian judges in the world and in the hereafter.

Keywords: *Guardian Judge, Marriage, Fiqh, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peranan wali hakim dalam perkawinan, di KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kutoarjo (KUA) Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yakni menikahkan calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali atau walinya tidak diketahui keberadaannya kemudian perwaliannya dialihkan kepada wali hakim dalam hal ini Kepala KUA, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Kemudian, sebelum Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim maka terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian oleh pihak KUA yang menunjukkan kebenaran atas masalah perwaliannya dari calon mempelai tersebut. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan melindungi kaum wanita dari kemungkinan merugikan dalam rumah tangga perkawinannya, serta terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan. Peran wali hakim di KUA kecamatan Kutoarjo kabupaten purworejo berdasarkan tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu menghadiri, menyaksikan, mencatat, dan menikahkan perempuan yang akan menikah namun tidak

mempunyai wali nasab, dan akan mempertanggung jawabkan peran beliau ketika menjadi wali hakim di dunia dan di akhirat.

Kata kunci: *Posbakum, Tata Cara, Pendampingan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (*zoom polition*) yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan masyarakat. Dari perkawinan terbentuknya keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan itu serta memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, melahirkan sebuah anggota keluarga menjadi kebahagiaan bagi siapa saja sebab telah mengalirkan darah keturunan baru kepada keluarganya sehingga mampu tumbuh dengan kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.¹

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur pokok suatu perkawinan ialah laki-laki dengan perempuan hendak melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya ialah ijab dan qabul. Islam menjadikan ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.³ Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Syarat nikah juga berkaitan dengan rukun nikah, yaitu harus terdapat wali,

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2003),hlm.11

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

³ Syahbudin, Qaliyubi Wa Umairah (Singapore:Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i).hlm.216

dan orang sebagai wali telah memenuhi syarat dari al-Qur'an, As-Sunnah, serta hukum yang ada

Dikatan sah menjadi wali mempelai wanita jika itu :

1. Ayahnya
2. Kakeknya (ayah dari ayah pengantin wanita)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah saja dengannya
5. Anak dari saudaranya
6. Anak dari saudara tiri dengan dia
7. Saudara laki-laki dari ayahnya (paman)
8. Anak pamannya dari pihak ayahnya
9. Hakim ⁴

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan jika tidak dilakukan oleh seorang wali dari pihak perempuan. Keharusan adanya wali nikah dalam perkawinan sangat jelas termaktub dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “ *Tidak ada nikah,kecuali dengan wali*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hukum tertulis yang berlaku, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar memberikan kepastian hukum. Di Indonesia, aturan tentang pencatatan Perkawinan dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang No.32 tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk. Perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung tanpa adanya seorang wali dari pihak mempelai wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali didefinisikan dengan : Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Selain kondisi-kondisi diatas, seorang anak perempuan yang lahir di luar perkawinan juga menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali

⁴ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pusaka Setia : 1994).hlm.110

nasab kepada wali hakim. Hal ini disebabkan seorang anak perempuan yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab pada ibunya serta keluarga ibunya saja.⁵

Di Indonesia, kepala negara ialah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Adapun yang berwenang sebagai wali hakim adalah kepala urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Karena yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala KUA, yang merupakan unit pelaksana teknis pada kementerian agama, yang berada di bawah tanggung jawab direktur jendral bimbingan masyarakat islam, sehingga peran dan tanggung jawabnya tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termasuk juga di dalamnya peran dan tanggung jawab wali hakim di KUA kecamatan Kutoarjo.⁶

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat kita saat ini, pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim masih sering terjadi dimana wali yang paling berhak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali nasab tanpa memperhatikan urutan wali yang telah diatur sebelumnya. Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perkawinan dengan wali hakim harus memastikan alasan calon pengantin untuk memberikan kekuasaan pada wali hakim sebagai wali dari pihak mempelai wanita.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis terdorong untuk membahas permasalahan tersebut yang terjadi di KUA Kecamatan Kutoarjo. Dimana dapat diambil rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut; yaitu, Bagaimana Peran Wali Hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kutoarjo? Dan apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo?. Dengan tujuan agar pemahaman terkait perwalian dengan wali hakim ini bisa dipahami umat secara umum, dan bagi masyarakat kecamatan Kutoarjo secara khusus dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama kecamatan Kutoarjo. Maka sangat signifikan dan urgen bagi penulis untuk mengkaji atau meneliti lebih jauh dan

⁵ Imam Hafas, *Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim, e-journal Al-Syakhsiyah of Law and Family Studies*, Vol.3 No. 2(2021)hlm.3

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.97

mendalam mengenai “ Peran Wali Hakim Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kutoarjo”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *field research* yang merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang memenuhi berbagai gejala sebagai suatu hal yang saling terkait dalam hubungan fungsional dan merupakan satu kesatuan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik. Kualitas penelitian kualitatif ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder. Dimana data primer dimaksudkan untuk melakukan observasi dan wawancara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo. Sedangkan data sekunder dimaksudkan untuk memperoleh bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan hukum islam yang mengatur masalah hukum perkawinan di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

1. Peran Wali Hakim di KUA Kecamatan Kutoarjo

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrawi manusia. Ia merupakan kebutuhan esensi bagi setiap orang untuk membangun rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Pernikahan adalah awal terbentuknya keluarga baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri di ikat dengan komitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.⁷

⁷ Haerul dan Rahmatia HL, *Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar*, Shautuna 2, no.1 (2021), hlm 29

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. Wali hakim merupakan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, dalam hal ini kepala KUA. Wali hakim KUA Kecamatan Kutoarjo merupakan pejabat atau Kepala KUA yang dimandatkan oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim yang ditempatkan pada tingkat pemerintah bawah atau kecamatan yang diharapkan mampu membantu tugas Menteri Agama dalam hal perwalian, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.⁸

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".⁹ Berdasarkan ketentuan tadi, maka peranan wali nikah sangat penting bagi seorang perempuan pada akad nikah sebab selain perintah agama, perempuan merupakan makhluk mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh Sang Pencipta serta memiliki satu kedudukan yang mampu menjaga prestise, humanisme, serta kesuciannya adalah wujud cinta dan kasih seorang ayah atau keluarganya pada anak perempuannya yang hendak membina suatu rumah tangga. Karena hal tersebut, wali ialah persoalan yang sangat penting bagi pernikahan karena tidak terdapat pernikahan tanpa wali serta wali sebagai syarat bagi sahny suatu pernikahan. Sesuai dengan kedudukannya sebagai wali nikah, maka bisa dikaitkan dengan Pasal 20 Kompilasi hukum Islam sebagai berikut :

1. Yang bertindak menjadi wali nikah adalah seseorang laki-laki dengan memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil serta baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Peranan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Suli yakni sama halnya dengan wali nasab pada umumnya yaitu menikahkan. Namun disini peranan wali hakim ialah menikahkan calon mempelai wanita yang perwaliannya diserahkan kepada

⁸ Ismayanti Rais, Muh Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani, *Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No. 1, hlm. 281

⁹⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 19

kepala KUA dan tidak bias digantikan. Maksudnya, orang yang berperan dan bertindak sebagai wali hakim adalah kepala KUA kecamatan Kutoarjo.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Muh Zainal Fitri,M.Ag selaku kepala KUA kecamatan Kutoarjo tentang apasaja peran wali hakim di Kua kecamatan Kutoarjo “ adapun peran saya selaku wali hakim dalam sebuah pernikahan yaitu menghadiri, menyaksikan, dan mencatat agar pernikahan tersebut sesuai SOP yang berlaku, sehingga bias legal menurut Negara dan agama, adapun peran atau tugas yang terakhir yaitu menikahkan seorang perempuan yang akan menikah dengan calon suaminya namun tidak mempunyai wali nasab. Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran wali hakim di KUA kecamatan Kutoarjo dalam pernikahan menjalankan tiga peran, yaitu:

1. Menghadiri dan menyaksikan

Pada poin pertama ini Kepala KUA kecamatan Kutoarjo menjelaskan bahwa maksud dari menghadiri dan menyaksikan pernikahan yaitu untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut legal menurut aturan agama dan juga legal menurut negara.

Terkait apakah wali hakim dari mempelai perempuan harus hadir ditempat berlangsungnya pernikahan, maka Taqiyuddin Al-Hishni Al-Syafi'i mengatakan bahwa disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Adapun wali atau calon mempelai pria jika berhalangan hadir maka boleh saja mewakilkan kepada orang lain.

2. Pencatatan

Kemudian pencatatan perkawinan dan pembuktian pernikahan dengan akta nikah, yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga, di dalam Islam hal demikian bisa disebut dengan masalah mursalah, yaitu sesuatu yang dinilai memiliki masalah oleh akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau dapat menghindarkan keburukan, kemudian pertimbangan akal tersebut relevan dengan tujuan ditetapkannya syara (Maqasid Syariah). Adapun yang dilakukan oleh kepala kantor urusan agama (KUA) Kutoarjo pada nomor satu dan dua, juga sesuai dengan yang ada dalam keputusan menteri agama nomor: 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi

kantor urusan agama kecamatan pada pasal 2 Jo. peraturan menteri agama (PMA) Nomor: 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 huruf ayat (1). Jo. Peraturan menteri agama (PMA) nomor: 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama.

3. Menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab

Kemudian peran kepala KUA kutoarjo pada poin ke tiga ini yaitu menikahkan perempuan yang akan menikah namun tidak memiliki wali nasab. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Aisyah Ra yang artinya “ Dan apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi siapa saja yang tidak mempunyai wali”¹⁰

2. Pengertian Wali Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang dimaksud Wali Hakim adalah Kepala Kantor yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.

Menurut Azhar Basyir, perwalian dalam bahasa arab disebut wilayah. Kata wilayah berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarat untuk melakukan tindakan atau akad, yang memiliki akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri. Wali Hakim merupakan wali bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan omenikahkan. Wali Hakim baru dapat bertindak menjadi wali dalam pernikahan, apabila wali nasab berhalangan hadir dalam akad yang sedang dilangsungkan. Secara teknis, penunjukan wali hakim melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

Adapun yang dimaksud Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila kondisi calon mempelai wanita tidak memiliki

¹⁰ Lio Saputra, Muhammad Ali Bakri, Mukhlis Bakri, Peran Wali Hakim Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Rappocini Kota Makkasar, Departement Of Law, Universitas Muhammadiyah Makkasar, Vol.3.hlm. 93

wali nasab, walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya), wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada ditempat yang sejauh *musafaqotul qasri* (sejauh perjalanan yang memperbolehkan solat qasar yaitu 92,5 km) , wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali ahddhal dan wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Sementara menurut beberapa literature dalam islam, khususnya dalam fiqih menjelaskan tentang urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, yaitu ayah kandung, kakek (dari garis ayah) dan seterusnya kedalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah sekandung (paman), saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung dan anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

3. Faktor Penyebab Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo

Perkawinan adalah akad nikah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahrom. Untuk terlaksananya sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan Negara, perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Salah satu syarat pernikahan yaitu adanya seorang wali bagi calon mempelai perempuan. Ketika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak sah sebuah perkawinan yang sedang dilangsungkan. Mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menyatakan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Ketiadaan seorang wali nasab adalah faktor penghambat dalam melangsungkan perkawinan, oleh karena itu di dalam KHI pasal 20 dijelaskan bahwa “ yang bertindak

sebagai wali nikah adalah seseorang yang memenuhi syarat hukum islam yakni, muslim, akil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Faktor penyebab pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yang terjadi di KUA kecamatan Kutoarjo tidak jauh beda dengan apa yang penulis uraikan sebelumnya, yaitu faktor pertama adalah Habisnya wali nasab, yang dalam hal ini adalah ayahnya telah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki sebagaimana diatur dalam urutan wali yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka atas kondisi ini juga dapat menggunakan wali hakim, sebab jika menggunakan wali perempuan maka pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat di sahkan baik secara agama maupun hukum di Negara ini.

Faktor kedua yaitu, wali nasab tidak diketahui keberadaanya. Yang artinya keberadaab ayah tidak diketahui sama sekali (bahkan hidup dan matinya pun tidak jelas). Maka dengan kejadian tersebut bisa menggunakan wali hakim. Dalam syarat sudah ada konfirmasi dari pihak keluarga dan benar-benar sang ayah tidak dapat dihubungi atau benar-benar tidak diketahui keberadaanya sekarang.

Hal serupa juga akan terjadi pada calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nikah karena disebabkan dilahirkan di luar nikah atau hamil di luar nikah dan baru melangsungkan pernikahan saat usia kandungan lebih dari 4 bulan. Calon mempelai perempuan yang memiliki kasus tersebut, maka terpaksa harus menggunakan wali hakim, hal ini dianggap wali nasabnya tidak ada. ¹¹

KESIMPULAN

Peran wali hakim di KUA kecamatan Kutoarjo yaitu menghadiri, menyaksikan, mencatat dan menikahkan perempuan yang akan menikah namun tidak mempunyai wali nasab, dan akan memepertanggung jawabkan peran beliau ketika menjadi wali hakim di dunia dan di akhirat.

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang Penetapan Wali Hakim. Perkawinan dapat dilaksanakan dengan

¹¹ Imam Hafas, Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Studi di KUA Pademawu, e-Journal Al-Syakhsyah Of Law And Family Studies, Vol.3, No.2 (2021). Hlm. 68

wali hakim dengan beberapa kondisi yaitu, tidak memiliki wali nasab, wali ahdhal (wali yang menolak menikahkan anaknya), keberadaan wali sangat jauh dengan lokasi pernikahan (*musyafatal qasri*), wali nasab telah meninggal dan tidak ada wali nasab yang lain, dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA